

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Jesiska Cristin Karwur¹, Anderson G. Kumenaung², Agnes L. Ch. P. Lopian³
jesiskakarwur@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier dalam Winarti, 2014: 41). Todaro dan Smith (2003) menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2004-2018. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Untuk pengujian secara ekonometrika dilakukan uji asumsi klasik, dan untuk uji hipotesisnya menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, uji-F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak, dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menguji kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Adapun hasil yang diperoleh adalah secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, naiknya pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara parsial pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, naiknya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara bersama-sama pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of government spending on education and health sectors on human development index in North Sulawesi Province.. A nation must increase investment in education and health to achieve development (Meier in Winarti, 2014:41). Todaro and Smith (2003) state that government expenditure on the health sector issued to fulfill one of the basic rights to obtain health services in the form of facilities and health services is a requirement for increasing community productivity. The data used in this research are secondary data from 2004-2018. The analytical method used is multiple linear regression analysis, for econometrics test done with classic assumption test, and for the hypothesis test it uses a t-test to partially test the effect of variables, F-test to test the effect of variables simultaneously, and test coefficient of determination (R^2) to test the ability of the regression model to explain the variation of the dependent variable.

The results obtained are Government Expenditure for Education partially affected on Human Development Index in North Sulawesi Province. Means, the increase in education sector government spending affects the human development index. Government expenditure for health did not effect on Human Development Index in North Sulawesi Province. Means, the increase in government health sector expenditure did not affect the human development index. Simultaneously government expenditure in education and health sectors affected the human development index in North Sulawesi Province.

Keywords: Human Development Index, Government Expenditures for Education, Government Expenditures for Health.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam skala global, tidak hanya peningkatan kapasitas produksi maupun ekspansi ekonomi, tetapi juga termasuk didalamnya peningkatan segala sumber-sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Setiap negara dituntut untuk dapat menumbuh kembangkan perekonomiannya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup, tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakatnya. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Ketika masyarakat telah memiliki keahlian maka produktifitas mereka akan lebih meningkat, di saat itulah masyarakat akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang efektif (Laisina, 2015).

Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan umat manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) melalui *United Nations Development Program* (UNDP). *United Nations Development Program* (UNDP) dalam laporannya tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Manusia Pembangunan) pada tahun 2000 menyatakan bahwa: "Orang adalah kekayaan nyata bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan potensi lingkungan bagi orang untuk menikmati hidup yang panjang, hidup sehat dan produktif" (Lapian, Agnes. 2017).

Alat ukur ini dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics pada tahun 1990 dan telah disepakati dunia melalui *United Nations Development Program* (UNDP).

IPM dapat menggambarkan perkembangan manusia secara terukur dan representatif. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang (*United Nations Development Program/ UNDP*, 1996). IPM diukur dengan 3 dimensi yaitu berumur panjang dan sehat ditunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir, yang dirumuskan menjadi Indeks Angka Harapan Hidup, berdimensi ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah membentuk Indeks Pendidikan, dan dimensi standar hidup layak ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita yang dibakukan dalam Indeks Pendapatan (www.id.undp.org).

Berdasarkan Grafik 1 pada lampiran, Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi di Indonesia Sulawesi Utara menempati peringkat ke tujuh dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,2 persen, dan di urutan ke enam ada Provinsi Riau dengan nilai presentase Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,44 persen, di urutan ke lima ada Provinsi Bali 74,77 persen dan di urutan ke empat ada Kepulauan Riau sebesar 74,84 dan diperingkat ketiga ada Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai presentase sebesar 75,83 dan di urutan kedua ada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan presentase nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79, 53 persen dan di peringkat pertama yaitu DKI Jakarta dengan nilai presentase Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,47 persen.

Dari tahun ke tahun Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengalami tanda bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia semakin baik dilihat dari segi kesehatan, Pendidikan, dan ekonominya. Hal ini mencerminkan

kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Namun disisi lain *United Nations Development Programme* (UNDP) melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan perkembangan IPM tersebut. “Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat bahwa ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp.20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak dua juta anak dibawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Ketiga akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi” (CNN Indonesia, 2017).

Meskipun IPM Indonesia memiliki point IPM tinggi, namun jika dibandingkan dengan negara di ASEAN, peringkat IPM Indonesia masih jauh tertinggal. Tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia negara Indonesia sebesar 68,9. Masih dibawah negara Singapura (92,5), Brunei Darussalam (86,5), Malaysia (78,9), dan Thailand (74).

Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah dengan potensi sumber daya manusia yang cukup padat, dengan kondisi Indeks Pembangunan Manusia yang cenderung meningkat pada beberapa Tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik di lampiran 2. Berdasarkan Grafik 2 pada lampiran, menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2009 IPM Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan pertumbuhan dan peningkatan yaitu sebesar 75,68 persen. Namun pada tahun 2010 terjadi penurunan yang sangat signifikan yang menyebabkan IPM Indonesia dan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun ini merosot tajam yaitu dari 75,68 pada tahun 2009 turun menjadi 67,83 pada tahun 2010. Penurunan IPM pada tahun 2010 diduga dipengaruhi oleh krisis yang bermula dari perekonomian Amerika tahun 2008 (Setiawan, 2015). Kemudian IPM Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2019. IPM Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari 67,83 di tahun 2010 menjadi 72,99 di tahun 2019.

Melihat perkembangan pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara yang terus menunjukkan perbaikan dan peningkatan, maka perlu adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan khusus berkaitan dengan sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap pembangunan manusia atau modal manusia agar kualitas sumber daya manusia dapat terus bertumbuh. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulham, dkk, 2017) menyatakan bahwa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan sebagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor atau bidang pendidikan dan kesehatan.

Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar disuatu wilayah. Untuk mendukung kedua aspek tersebut dibutuhkan anggaran. Oleh sebab itu, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor Pendidikan dan kesehatan.

Kondisi anggaran Pendidikan di Sulawesi Utara cenderung mengalami peningkatan walaupun beberapa kali mengalami angka fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari Grafik 3 di lampiran. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa anggaran Pendidikan berfluktuasi sebanyak empat kali tetapi cenderung mengalami peningkatan. Selain anggaran di bidang Pendidikan anggaran kesehatan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam Grafik 4 di lampiran. Berdasarkan Grafik 4 dapat di lihat bahwa anggaran bidang kesehatan terus meningkat sampai pada tahun 2015 tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dan kembali meningkat

sampai pada tahun 2019, jadi kesimpulannya anggaran kesehatan hanya berfluktuasi sebanyak satu kali pada periode tahun 2004-2019.

Adanya *Gap research* penelitian terdahulu juga menjadi faktor penting dalam penelitian ini dimana ada perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang diperoleh peneliti-peneliti sebelumnya berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti yaitu; Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Kahang, 2016) Untuk hubungan variabel pengeluaran sektor pendidikan terhadap IPM menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara signifikan mempengaruhi IPM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulham, 2017) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dan untuk hubungan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM, penelitian yang dilakukan oleh (Meylina: 2013) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Bhakti: 2012) menemukan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Utara?
3. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi utara secara simultan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Utara.
2. Menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Utara.
3. Menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi utara secara simultan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi instansi pendidikan dan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan sekaligus menjadi referensi kepustakaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama Program Magister Ilmu Ekonomi.
- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan wadah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi untuk selanjutnya di implementasikan dalam bentuk penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi dalam evaluasi maupun dalam pengambilan kebijakan.
- b. Selain itu dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia.

Landasan Teori

Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup di nikmati standar hidup yang layak.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999):

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Tujuan dari teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Adapun hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pasal 10 dan pasal 11 bagian keempat menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Menurut Todaro dan Smith (2006) kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna dari pembangunan. Terlebih lagi bagi kelompok masyarakat miskin yang umumnya tidak punya sumber daya kecuali modal tenaga maka kesehatan menjadi kebutuhan yang paling esensial. Tenaga kerja miskin yang tidak sehat tidak akan mampu bekerja maksimal sehingga produktivitasnya akan rendah, dan pendapatannya juga rendah. Demikian pula kondisi kesehatan yang buruk terutama pada ibu dan anak akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Anak-anak yang kurang sehat akan mengalami gangguan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan pun akan mengalami penurunan.

Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat di alokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.

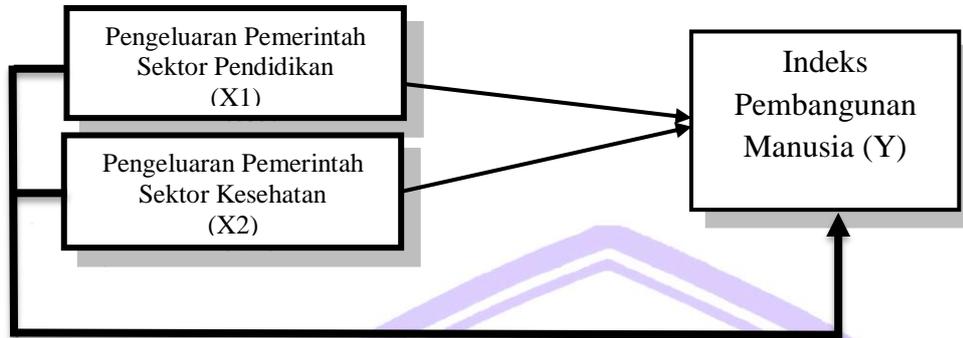
Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Wahid (2012) mengatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Pengeluaran pembangunan dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Asri (2011) menyatakan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Todaro dan Smith (2003) menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

1. Diduga Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara
2. Diduga Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara
3. Diduga Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik atau angka-angka.

Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara dari tahun 2004 sampai 2018.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Data diolah menggunakan *Microsoft Excel 2010* dan *Eviews 8*.

Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2016) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor yang dapat dinaikturunkan nilainya. Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh yang bersifat linear yang melibatkan dua atau lebih variabel independen untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel dependen. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X_1 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
- X_2 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
- e : *Standart error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara

Hasil perhitungan regresi berganda dapat dilihat dalam lampiran hasil olahan eviews dimana variabel anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai variabel independen dan IPM sebagai variabel dependen dilihat pada tabel di lampiran 5. Berdasarkan tabel di lampiran 5, memperoleh hasil Y: $0.674355 + 0.911747X_1 - 0.514536X_2$. Hasil olahan eviews menunjukkan hasil nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 0.674355, variabel anggaran pendidikan (X_1) sebesar 0.911747 dan variabel anggaran kesehatan (X_2) sebesar $-0.514536X_2$.

Hasil Uji t Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan (X_1) terhadap IPM (Y)

Hipotesis $H_0: \beta_i = 0$, artinya variabel anggaran pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y).

Hipotesis $H_0: \beta_i \neq 0$, artinya variabel anggaran pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y).

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus: $t_{\text{tabel}} : t_{\alpha; n-k}$, $\alpha = 5\%$, $= 0,5$

$N = 15 =$ Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah $N - k = 15 - 3 = 12$ lalu lihat tabel t distribution (df, F) $\sim (12; 0,5) = 1,782$. t tabel $= 1,782$ dan t hitung $= 1,880$.

Karena t hitung $>$ t tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara Parsial variabel independen anggaran pendidikan (X_1) mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y). Jadi dapat di simpulkan bahwa variabel anggaran pendidikan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X_1 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa anggaran pendidikan mampu 1,880 memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM. Nilai koefisien β_1 artinya hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh X_1 terhadap Y signifikan pada ($\alpha = 0,005$).

Hasil Uji t Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) terhadap IPM (Y)

Hipotesis $H_0: \beta_i = 0$, artinya variabel anggaran kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y).

Hipotesis $H_0: \beta_i \neq 0$, artinya variabel anggaran kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y). Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus:

t table : $t_{\alpha; n-k}$, $\alpha = 5\%$, $= 0,5$

$N = 15 =$ Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah $N - k = 15 - 3 = 12$ lalu lihat tabel t distribution (df,F) $\sim (12 ; 0,5) = 1,782$. dan t hitung $= -1.416$.

Karena t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara Parsial variabel independen anggaran kesehatan (X_2) tidak mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap IPM (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran kesehatan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap IPM pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Persamaan regresi menunjukkan angka negatif untuk koefisien X_2 dan hal ini tidak sesuai dengan harapan teoritik bahwa anggaran kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM, nilai koefisien β_2 sebesar -1.416 artinya hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh X_2 terhadap Y negatif atau tidak signifikan pada ($\alpha = 0,005$) (Widarjono, 2013).

Hasil Uji Simultan F Statistik (Uji F)

Hipotesis $H_0: \beta_1 = \beta_2$, artinya secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 tidak berpengaruh IPM (Y).

Hipotesis $H_a: \beta_1 \neq \beta_2$, artinya secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 , berpengaruh terhadap IPM (Y). $\Omega = 5\%$, $N =$ jumlah observasi, $K = 3$ Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah $N - k = 15 - 3 = 12$ lalu lihat F tabel distribusi values = ($\Omega = 0,5 : k - 1, n - k$) = F tabel = $3,49$ F hitung = 4.67 .

Karena F hitung $>$ F tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel indenden mempengaruhi IPM (Y). (Agus Widarjono, 2013).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang di tujukan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.727 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan mampu menjelaskan atau mempengaruhi 0.727% terhadap IPM dan sisanya $0,273\%$ di pengaruhi oleh variabel di luar variabel anggaran pendidikan dan kesehatan.

PEMBAHASAN

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan maju bukan hanya dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) saja, tetapi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Paradigma pembangunan terus mengalami perubahan evolusi, hingga saat ini paradigma pembangunan menjadikan manusia sebagai tujuan pembangunan. Kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan bangsa, sementara modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Pada hakekatnya, manusialah yang akan berperan aktif dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu di optimalkan. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kahang (2016) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”, Ilham (2016) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan bantuan sosial terhadap IPM di DIY”, serta Andiny (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa” memiliki hasil yang sesuai dengan teori dimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Sulawesi Utara cenderung mengalami peningkatan. Hasil ini sesuai dengan teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah yang semakin lama semakin meningkat juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan kesempatan kepada kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk membiayai pembangunan daerah khusus di sektor pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Jika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami peningkatan setiap periodenya maka hal ini akan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang akan terjadi pada masing-masing daerah. Secara teoritis pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diberikan kepada daerah dalam rangka membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah di bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang diharapkan mampu meningkatkan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Menurut Tjiptoherijanto (dalam Meylina, 2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat (Todaro & Smith, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh pengeluaran sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meylina (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia.

Tidak adanya pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena pemerintah belum mengalokasikan anggaran yang cukup banyak untuk sektor kesehatan. Rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Sulawesi Utara kurang dari 10% dari total APBD. Data dari BPS menunjukkan bahwa rata-rata angka harapan hidup memang cenderung mengalami perbaikan, tetapi tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. Kondisi ini menandakan bahwa meski kualitas kesehatan di Sulawesi Utara telah mengalami peningkatan, tetapi secara esensi masih belum optimal.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Besarnya Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara masih belum mampu membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sulawesi Utara, hal ini menandakan bahwa pengeluaran untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara parsial, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.
2. Secara parsial, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara
3. Secara bersama-sama, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

Rekomendasi Kebijakan

1. Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara direkomendasikan adalah secara konsisten menaikkan Alokasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan, agar supaya dapat meningkatkan kualitas SDM, SDM yang unggul dan berdaya saing diharapkan dapat mendorong produktivitas dan daya saing nasional yang secara langsung akan turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk lebih meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menyediakan pelayanan dan fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang masih belum tersedia layanan kesehatan yang memadai serta terus melakukan pengawasan dan peningkatan terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut, melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, mengadakan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

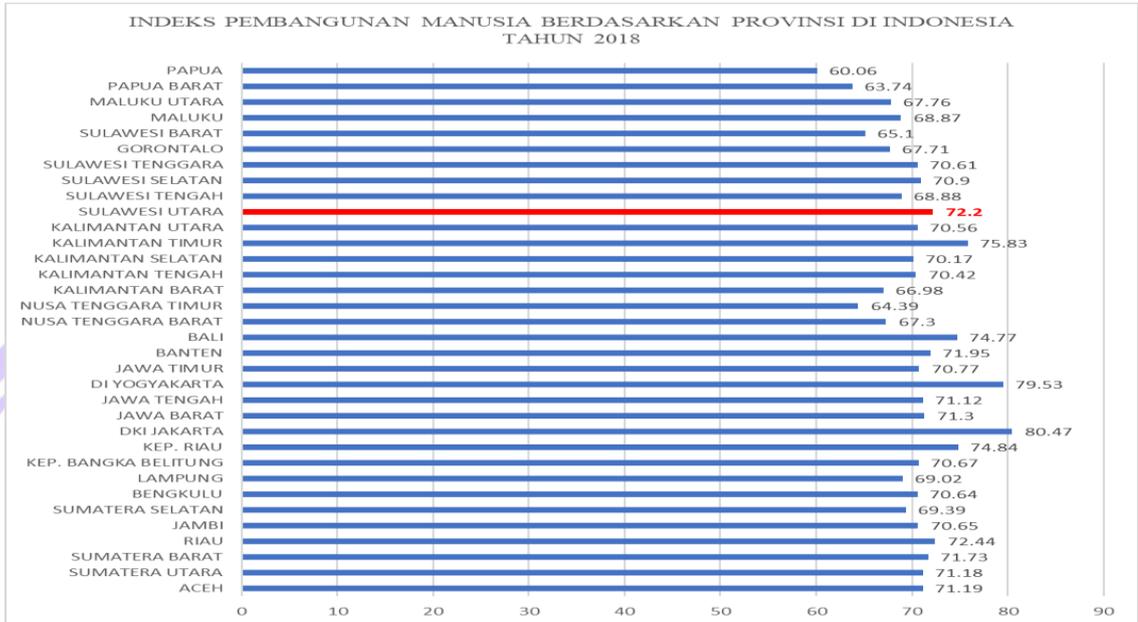
DAFTAR PUSTAKA

- Andiny, Puty. 2018. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa" dalam Jurnal Samudera Ekonomika.
- Boediono, 1999. "Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama BPFE" Yogyakarta.
- Bhakti, Nadia Ayu. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012" dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Erlangga.
- Ilham Akbar. 2016. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dan bantuan social terhadap IPM di DIY" dalam Jurnal Economics Development Analysis Journal.
- Kahang, Merang. Saleh, Muhammad. Suharto, Rachmad. 2016. "Pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur" dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

- Lapian, Agnes L. Ch. P. 2017. "Growth and Employment Determinants Factors in North Sulawesi Province" dalam Jurnal *Journal of Research in Business, Economics and Mangement* (JRBEM).
- Laisina, Cliff. Masinambow, Vecky. Rompas, Wensy. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013" dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi.
- Mangkoesobroto, Guritno, 1994, "Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi". Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mangkoesobroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: FE UGM
- Meylina Astri. 2013. "Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sector kesehatan dan Pendidikan di Indonesia" dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis.
- Setiawan, Gusi Bagus Koming Putera. Budiana, Dewa Nyoman. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali" dalam Jurnal *E-Jurnal EP Unud*.
- Sugiyono. (2016). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: PT Alfabet.
- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. "Pembangunan Ekonomi di Dunia". Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. "Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)". Jakarta : Erlangga.
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang Undang 1945 Pasal 28 H ayat 1 Tentang Pembangunan Kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan yang menyatakan bahwa Rumah sakit merupakan sarana kesehatan
- UNDP. 1996. "Human Development Report" United Nations Development Programme New York
- UNDP. Human Development Report 1993:105-106.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf
- UNDP. Human Development Index (HDI) 1994:94.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
- United Nation Development Programme (UNDP). (1995). The state of human development. UNDP, New York (forth coming in September)
- UNDP. 2007. United Nations Development Programme: Indonesia. Retrieved 24 May 2007 from <http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>
- Wahid, Bila. A. 2012. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi", Makassar.
- Winarti, A. 2014. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012 di Semarang" dalam Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Yatiman, N. 2012. "Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2008-2010". dalam Jurnal *Diponegoro University Institutional Repository Journal*.
- Zulham., dkk. 2017. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Bali" dalam Jurnal *Perspektif Ekonomi*. Darussalam.

LAMPIRAN

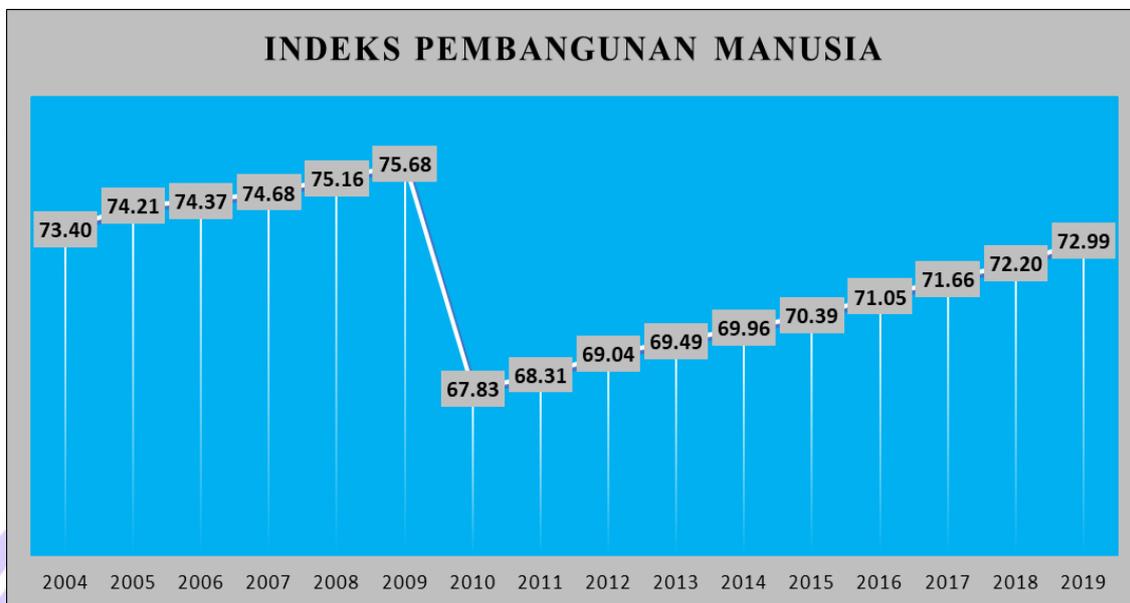
Grafik 1
Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Prestasi Masing- Masing Provinsi di Indonesia Tahun 2018



Sumber: BPS Indoensia 2018 (Diolah)



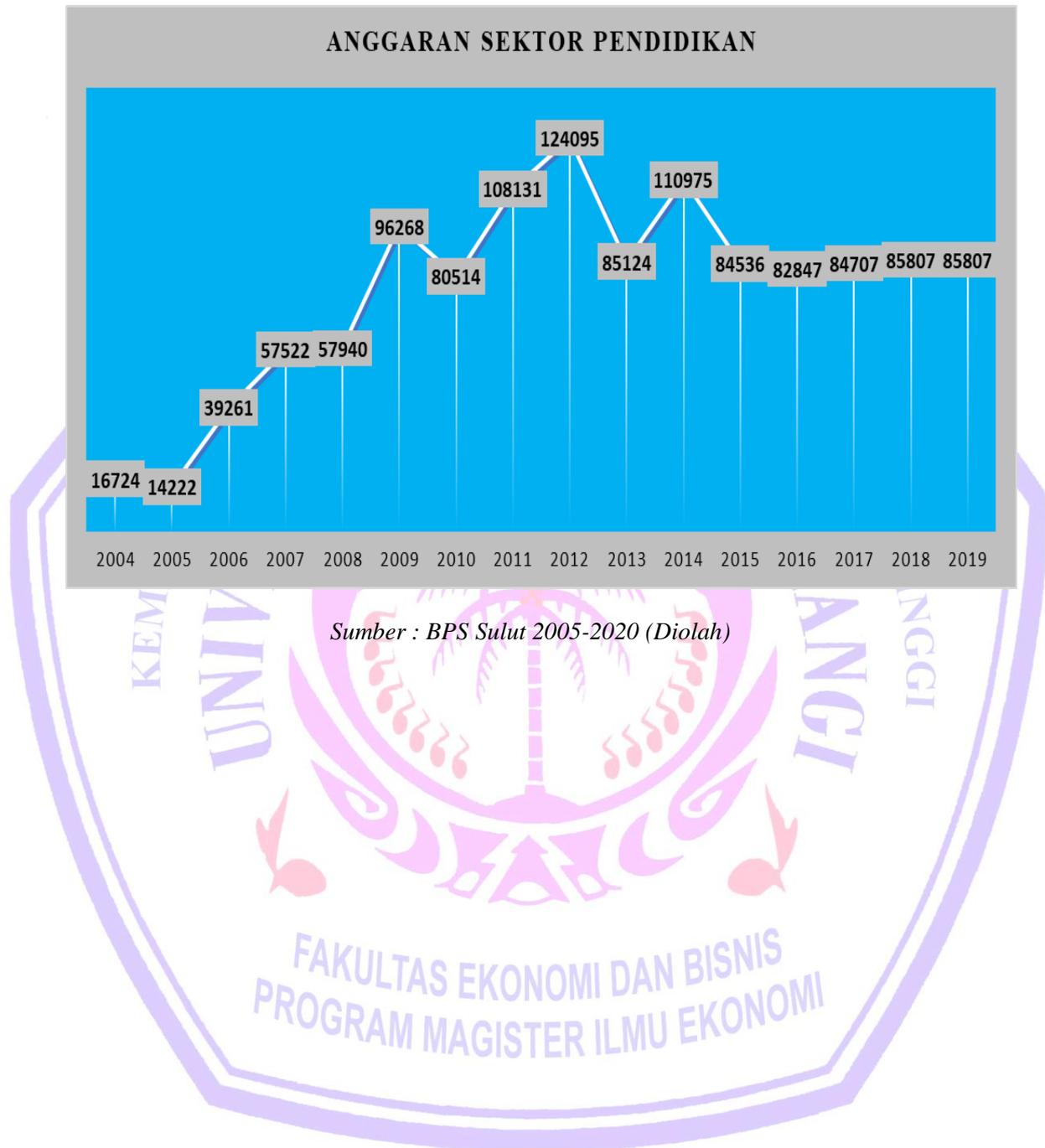
Grafik 2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Prov. SULUT
Tahun 2004-2019



Sumber : BPS Sulut 2020 (Diolah)



Grafik 3
Perkembangan Anggaran Pendidikan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2004-2019



Sumber : BPS Sulut 2005-2020 (Diolah)

Grafik 4
Perkembangan Anggaran Bidang Kesehatan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2004-2019



Sumber : BPS Sulut 2005-2020 (Diolah)



Tabel 1
Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/29/20 Time: 13:29				
Sample: 1 15				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.674355	2.450979	0.275137	0.7879
X1	0.911747	0.484924	1.880185	0.0846
X2	-0.514536	0.363300	-1.416285	0.1821
R-squared	0.727594	Mean dependent var		3.722693
Adjusted R-squared	0.098860	S.D. dependent var		0.349746
S.E. of regression	0.332008	Akaike info criterion		0.809542
Sum squared resid	1.322752	Schwarz criterion		0.951152
Log likelihood	-3.071562	Hannan-Quinn criter.		0.808033
F-statistic	4.679397	Durbin-Watson stat		1.786585
Prob(F-statistic)	0.212360			

Sumber : data diolah evIEWS 0.8